



SEJARAH PRRI/PERMESTA: AWAL MULA MUNCULNYA OTONOMI DAERAH SECARA MENYELURUH DI INDONESIA

Dhoni Frizky Aryasahab

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, aryasahab289@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 16-12-2022

Disetujui: 28-06-2022

Kata Kunci:

PRRI

Permesta

Pemberontakan

Sumatera Barat

Keywords:

PRRI

Permesta

Rebellion

West Sumatra

ABSTRAK

Abstrak: Perjuangan Bangsa Indonesia melawan disintegrasi bangsa terjadi di seluruh Indonesia salah satunya PRRI/Permesta. Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dampak tersebut. Pemberontakan ini terjadi karena adanya bentuk ketidakseimbangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau lainnya, sehingga PRRI/Permesta memunculkan ide untuk menyamaratakan bentuk keseimbangan ekonomi dengan cara desentralisasi atau otonomi daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk refleksi dari pemberontakan PRRI/Permesta berupa otonomi daerah dan juga sebagai sumber pembelajaran bagi para pembaca. Metode deskriptif menjadi metode dalam artikel ini dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Metode studi Pustaka ini melalui pencarian referensi atau sumber mengenai permasalahan yang ditemukan didalam jurnal, artikel ilmiah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sejarah pemberontakan PRRI/Permesta sebagai refleksi adanya bentuk otonomi daerah di Indonesia.

Abstract: The struggle of the Indonesian nation against the disintegration of the nation occurs throughout Indonesia, one of which is PRRI/Permesta. West Sumatra is one of the areas affected by this. This rebellion occurred because of the form of economic imbalance between the island of Java and other islands, so that PRRI/Permesta came up with the idea to generalize the form of economic balance by means of decentralization or regional autonomy. This article aims to find out the form of reflection of the PRRI/Permesta rebellion in the form of regional autonomy and also as a source of learning for readers. The descriptive method is the method in this article by using data collection techniques in the form of library research. This library study method is through searching for references or sources regarding problems found in journals, scientific articles. Thus, it can be seen that the history of the PRRI/Permesta rebellion is a reflection of the existence of a form of regional autonomy in Indonesia.



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.12483>

SA license



This is an open access article under the **CC-BY-SA**

A. LATAR BELAKANG

Perjuangan bangsa Indonesia melawan Disintegrasi bangsa memang tidak mudah, terdapat berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia. Pergolakan seperti apa yang terus terjadi di Indonesia, hal tersebut sering muncul dibenak pertanyaan khalayak ramai. Pergolakan yang terjadi pada masa itu salah satunya seperti di Sumatera Barat yaitu terjadi pemberontakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau kerap kita sebut dengan PRRI, selain itu di Sulawesi

juga terjadi Pemberontakan yang dipelopori oleh Perjuangan Rakyat Semesta atau disebut dengan Permesta. Awal mula terjadinya pemberontakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diawali dengan pembentukan dewan-dewan di berbagai wilayah Sumatera Barat. Pada tanggal 20 Desember 1956 terjadi pembentukan dewan Banteng yang dipimpin oleh Kolonel Achmad Hussein yang berlokasi di Sumatera Barat dan pembentukan dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon yang berlokasi di

Sumatera Utara. Kemudian pada pertengahan Januari 1957 dibentuk dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian yang berlokasi di Sumatera Selatan, dan terakhir pada tanggal 18 Februari 1957 terbentuklah dewan Maguni yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumuai yang berlokasi di Sulawesi (Wiyatmi, 2013).

Pada tanggal 15 Februari 1958 Letnan Kolonel Achmad Husein mendirikan sebuah organisasi yaitu sebuah Gerakan yang bertujuan menyelamatkan negara Republik Indonesia. Gerakan tersebut akhirnya mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan lokasi pemerintahan di Bukittinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri PRRI. Setelah itu pada tanggal 2 Maret 1957 terbentuklah Gerakan yang mendukung PRRI di wilayah Sulawesi yaitu Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Tokoh-tokoh yang termasuk kedalam Permesta antara lain Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, Mayor Gerungan, serta Letnan Kolonel Saleh Lahade. Pada saat pembentukan Permesta ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, akan tetapi pusat pemerintahannya berada di Manado, Sulawesi Utara. Dengan demikian Gerakan PRRI dan Permesta pada saat itu sering disebut dengan PRRI/Permesta. Atas berhasilnya diproklamkan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi, membuat pemerintah membuat suatu keputusan untuk menumpas Gerakan-gerakan yang dianggap memberontak pemerintah Indonesia (Sarlian, 2020).

Berbagai permasalahan muncul setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Pergolakan ini terjadi bukan dari sisi eksternal tetapi dari sisi internal, yaitu banyak rakyat Indonesia sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya pergolakan. Diawali oleh permasalahan Darul Islam, ancaman komunis, dan juga Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Berbagai permasalahan ini diakibatkan oleh tidak meratanya ekonomi di Indonesia, kemudian terjadi pembekuan institusi sipil di wilayah Sumatra Barat, dan yang selanjutnya adalah gagalnya pemilihan umum, sehingga dari permasalahan tersebut timbul rasa kecewa pada masyarakat Sumatera Barat dan

Sulawesi pada saat itu. Pada tanggal 10 Februari 1958, Kolonel Achmad Hussein yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan sebuah ultimatum dengan rincian isi yaitu; (a) Kabinet Djuanda dibubarkan dan pengembalian mandat kepada Presiden dalam kurun waktu 5x24 jam; (b) Hamengkubuwono IX dan Mohammad Hatta dipilih sebagai pembentukan kabinet baru; (c) Kabinet baru bekerja sampai diadakan pemilu; (d) presiden Soekarno patuh terhadap konstitusi; (e) Jika tuntutan ini tidak didengarkan dan tidak ditindaklanjuti, maka Kami akan mengambil Langkah sendiri untuk menyuarkan aspirasi (Wahyudi dan Hardi, 2021).

Pasca kemenangan PKI pada Pemilu tahun 1955 dengan urutan keempat diantara partai besar lainnya, membuat Gerakan PRRI/Permesta semakin kuat dan hebat. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterlibatan PKI yang masuk ke dalam pemerintahan Soekarno. Pada saat itu terjadi suatu ketimpangan antara daerah di Pulau Jawa dengan daerah di luar pulau Jawa. Pembangunan terus digencarkan di daerah Pulau Jawa, sedangkan daerah luar pulau Jawa hanya sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang nantinya disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian disisi lain terdapat sebuah konflik yang terjadi di dunia militer Indonesia, karena pada saat itu para petinggi militer yang berada di luar Jawa yaitu pada daerah Sumatera dan Sulawesi merasa bahwa mereka kurang diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan para pejabat yang nantinya memimpin militer di daerah luar pulau Jawa itu berasal dari orang Jawa, bukan dari daerahnya masing-masing. Dari kejadian tersebut menyebabkan para tokoh militer membuat sebuah gerakan yang dianggap sebagai suatu pemberontakan oleh pemerintahan Soekarno pada saat itu. Tokoh-tokoh tersebut adalah Kolonel Sumual dan Kolonel Simbolon dari Gerakan Permesta, kemudian tokoh politik Indonesia lainnya dari partai Masyumi yaitu Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Sumitro Djojohadikusumo serta Burhanudin Harahap (Nurbaity, 2022).

Ketimpangan-ketimpangan pada saat itu terus terjadi, dan menjadi suatu keresahan bagi masyarakat Sumatera dan Sulawesi. Salah satunya masyarakat di wilayah Sumatera Tengah yaitu karena sumber daya alam yang dihasilkan di daerah ini terus diekspor dan disalurkan ke pulau Jawa oleh

pemerintah, sehingga menyebabkan masyarakat pribumi di wilayah Sumatera Tengah tidak mendapat keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Setelah itu Gerakan PRRI terus meluas dan menyebar di wilayah Sumatera yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Gerakan PRRI dipelopori oleh para tokoh militer serta terdapat bagian lain yang tergabung dalam Gerakan tersebut yaitu orang-orang dari sipil yang terdiri dari politikus, tokoh agama, pejabat, pelajar, dan lainnya. Gerakan pemberontakan PRRI ini juga terjadi akibat polarisasi politik pada masa pemerintahan Soekarno. Aspek lainnya yang menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat yaitu karena adanya sentiment etnis dan agama. Akibat berbagai permasalahan inilah yang menjadi latar belakang munculnya suatu pemberontakan yang semakun memanas situasinya. Namun, jika dilihat lebih detail lagi bahwa permasalahan yang utama dari terjadinya Gerakan PRRI yaitu karena adanya ketidakpuasan pemerintah daerah yang sudah dipendam oleh pemerintah daerah selama bertahun-tahun. Kemudian tidak adanya bukti sebuah desentralisasi di wilayah Indonesia menjadikan masyarakat pada saat itu membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah pusat lagi (May, 2015).

Para perwira militer mengambil sikap untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah Sumatera Barat dan Sulawesi dengan cara melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan kebijakan pemerintah pusat antara wilayah di daerah Jawa dengan daerah luar pulau Jawa. Sikap itu muncul karena adanya keputusan pemerintah untuk mengerucutkan tubuh TNI yang menyebabkan beberapa personil TNI harus meninggalkan jabatannya atau dikenal dengan sebutan gantung senjata. Kemudian atas kejadian tersebut muncul rasa kecewa bagi para TNI yang selama ini mereka sudah berjuang mempertahankan Republik Indonesia dari para penjajah. Disisi lain terdapat kisruh politik di pemerintah pusat, sehingga menjadikan sebuah peluang besar untuk pemerintah daerah membangun sebuah otonomi daerah. Dari kejadian tersebut, terlihat jelas bahwa mereka sangat menuntut pemerintah pusat untuk menyamaratakan otonomi daerah di Indonesia (Maulida, 2018). Oleh karena itu penulis membuat artikel ini untuk

mengetahui sejarah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan rakyat semesta (Permesta) serta mendapatkan suatu makna dan refleksi dari kejadian ini.

B. METODE PENELITIAN

Pada artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan suatu informasi bersifat deskriptif, baik itu dalam wujud tertulis atau lisan yang diambil dari perilaku seseorang yang dapat diteliti (Moeloeng, 2014). Kemudian dalam buku Sugiono (2013) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk meneliti suatu gejala alamiah yang nantinya membuahkan sebuah hasil penelitian dengan hasil akhir berpacu pada makna dari suatu generalisasi. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penelitian kualitatif adalah penelitian yang membuahkan hasil berupa data yang sesuai dengan keasliannya, tidak ada manipulasi atau rekayasa untuk mendapatkan hasil tersebut. Jenis data tersebut dapat diambil berupa data tertulis maupun lisan, sesuai dengan kebutuhan seorang peneliti.

Artikel ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah terkait objek yang sedang diteliti oleh seorang peneliti dengan cara memaparkan, menjelaskan, maupun dengan menggambarkan suatu objek penelitian yang berdasarkan pada fakta-fakta yang sesuai dengan keasliannya (Nawawi, 2015). Kemudian penggunaan pendekatan deskriptif pada artikel ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu gambaran atau penjelasan mengenai bentuk refleksi dari pemberontakan PRRI/Permesta menjadi kajian utama oleh penulis. Kemudian Teknik pengumpulan data dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang dibutuhkan oleh penulis. Studi literatur adalah Langkah-langkah dalam proses penghimpunan data, lalu membaca dan mengambil poin-poin penting yang dibutuhkan dalam artikel ini, serta mengolahnya untuk mendapatkan referensi yang sesuai (Zed, 2008). Data-data yang diambil yaitu dari jurnal, buku, artikel ilmiah, maupun sumber-sumber kredibel lainnya. Dalam hal ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data dari

berbagai sumber seperti jurnal dan artikel ilmiah mengenai PRRI/Permesta.

Setelah data-data yang dicari sudah terkumpul, Langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan, mengendalikan, menandai, Menyusun, atau bisa juga mengkategorikan data sehingga hasil akhir dari data tersebut dapat diperoleh dengan maksimal. Proses dalam menganalisis data yang sebenarnya dapat diawali pada saat penulis melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan bagi seorang penulis. Dalam buku Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa dalam analisis data kualitatif itu bersifat induktif, artinya analisis ini menelaah, mengulas, maupun menguraikan data yang didapatkan, dan tahap selanjutnya dikembangkan kedalam suatu hipotesis. Tahap berikutnya adalah uji keabsahan data. Ketika semua tahapan sudah dilaksanakan, untuk mendaptkan keabsahan data dari temuan maka dilakukan perpanjangan studi literatur. Selanjutnya tahap terakhir dari penulisan artikel yaitu kesimpulan yang berdasarkan analisis data dan selanjutnya menyusun laporan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Awal mula munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta

Pada tahun 1948-1965, bangsa Indonesia meghadapi berbagai ancaman disintegrasi. Berbagai pergolakan terjadi pada masa itu salah satunya Pemberontakan PRRI/Permesta. Penyebab terjadinya PRRI bukanlah peristiwa tunggal tetapi terkait dengan berbagai aspek pemerintahan yang diabaikan oleh Sukarno. Masalah utama adalah pengabaian aspirasi lokal dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara; dukungan keuangan untuk biaya operasional operasi militer sangat minim. Dari politik dan administratif, terdapat beberapa masalah, seperti berakhirnya dualisme Soekarno-Hatta, karena Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, tuntutan daerah otonomi, keuangan, peningkatan infrastruktur dan stabilitas keamanan daerah yang tidak ditangani dengan baik. Pemerintah daerah juga melihat ketidakadilan sentral dipembagian kue pembangunan, kebiri kekuasaan Sumatera Barat kelompok militer oleh Jenderal KSAD Abdul Haris

Nasution, dan komunis dominasi. Penyebab peristiwa tersebut tidak diungkapkan secara lengkap dan komprehensif, tapi sebagian. Munculnya PRRI merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Rasa kecewa ini disebabkan karena adanya ketimpangan mengenai otonomi daerah, semua kegiatan pembangunan terfokuskan di pusat sedangkan wilayah yang berada di luar pulau Jawa kurang diperhatikan. Pemerintah pusat menganggap Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemberontakan yang harus ditumpas, akan tetapi jika dipahami makna dari latar belakang munculnya Gerakan PRRI ini adalah karena munculnya rasa kecewa atas kebijakan pemerintah pusat berupa sentralisasi kekuasaan serta tidak meratanya pembangunan di Indonesia. PRRI juga bukan gerakan separatis tapi koreksi total dan keras dari rezim pusat, yang dianggap melanggar konstitusi.

Pemberontakan ini timbul bukan tanpa sebab melainkan karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta.

1. Faktor Politik

Pergolakan yang terjadi pada tahun 1948-1965 disebabkan karena kondisi politik di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada akhir tahun 1949 yaitu pemberontakan PKI tahun 1948, kemudian munculnya PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia), serta terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat). Permasalahan tak kunjung usai hingga memunculkan permasalahan baru yang begitu kompleks yaitu dengan terbentuknya UUDS yang digunakan selama Sembilan tahun lamanya, yaitu pada tahun 1950-1959. Diawali pada tanggal 17 Agustus 1950 bahwa Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sudah berlaku, dan didalamnya berisi mengenai tatanan politik yang sudah diatur. Kebijakan yang dikeluarkan dalam UUDS ini memberikan suatu dampak bagi sistem penyelenggaraan negara, yaitu yang awalnya menggunakan sistem presidensial menjadi sistem

parlementer. Kemudian pada sistem ini seorang presiden bukan hanya menjadi kepala pemerintahan saja, akan tetapi presiden juga merangkap menjadi kepala negara.

2. Faktor Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada saat itu menjadi penyebab terbentuknya PRRI/Permesta di Indonesia. Hal tersebut karena pembangunan dan ekonomi yang ada di pulau Jawa dengan pulau lainnya itu tidak merata. Pembangunan, ekonomi, dan semua aspek terfokus pada pulau Jawa, sehingga menyebabkan pulau-pulau yang lain merasa terabaikan. Pada tahun 1950an segala sesuatu mengenai pembangunan selalu terfokuskan pada daerah pemerintahan pusat yaitu pulau Jawa, sedangkan pembangunan di daerah luar pulau Jawa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dengan kejadian tersebut menjadikan rakyat Indonesia yang berada di luar pulau Jawa merasa kecewa dan terabaikan oleh pemerintah pusat, terutama masyarakat Sumatera Barat dan Masyarakat Sulawesi. Oleh karena itu dibentuklah PRRI/Permesta pada saat itu untuk menyuarakan keluhan kesah dan aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah pusat.

3. Faktor Militer

Faktor militer juga menjadi salah satu awal mula terbentuknya PRRI/Permesta. Kebijakan yang dikeluarkan melalui UUDS tentang sistem politik menjadi suatu penghambat bagi perkembangan politik di Indonesia, dan kebijakan tersebut tak luput dirasakan oleh kelompok militer Indonesia. Pada saat itu terjadi pengurangan Bataliyon yang menyebabkan sejumlah perwira TNI dinonaktifkan. Dari kebijakan ini muncul rasa kecewa dan terhina dari para prajurit TNI yang pada saat itu sudah berjuang mempertahankan Indonesia dari penjajah. Bentuk dari kekecewaan tersebut akhirnya para TNI yang dinonaktifkan mendirikan PRRI/Permesta dengan membuat dewan daerah militer sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

4. Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta

Suatu pemberontakan akan lahir karena munculnya rasa tidak puas dari masyarakat

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rasa tidak puas tersebut dimobilisasi oleh para tokoh yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari masyarakat. Dengan adanya mobilisasi ini merupakan Langkah yang tepat untuk melemahkan legitimasi dari pemerintah (Apriansyah and Wargadalem, 2020). Kemudian PRRI/Permesta lahir dengan tujuan untuk menyamaratakan pembangunan dan ekonomi yang pada saat itu tidak seimbang antara pembangunan yang berada di pulau Jawa dengan pembangunan yang berada di pulau lainnya. Semua pembangunan terfokus pada pemerintah. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab masyarakat di luar pulau Jawa merasa tersakiti dan juga merasa dianak tirikan karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sehingga PRRI/Permesta mengeluarkan ide untuk mengaspirasikan pendapat dan keinginannya dengan membentuk dewan militer daerah.

2. Pemberontakan PRRI/Permesta di Indonesia

a. Berdirinya PRRI/Permesta

Pada tanggal 11 Februari 1958, diadakan sebuah sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin kabinet. Sidang kabinet ini juga dihadiri oleh KSAU Suryadarma, KSAD Nasution, KSAL Subiyakto, serta Sekjen Kementerian Pertahanan Kolonel Hidayat. Pada sidang ini kabinet memberi keputusan dengan tegas bahwa kabinet ini menolak ultimatum dari dewan pejuang yang dipimpin oleh Husein. Disisi lain bersamaan dengan hasil sidang kabinet tersebut, telah dikeluarkan surat pernyataan dari dinas tentara berupa pemecatan. Surat pemecatan tersebut ditujukan untuk Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Letkol Ahmad Husein, serta Kolonel Maludin Simbolon.

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 1958 diproklamkan berdirinya suatu pemerintahan diluar dari pemerintahan pusat yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI diproklamkan pada pukul 22.00 WIB dengan perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Disisi lain pada

tanggal 17 Februari 1958, di Sulawesi terbentuklah suatu Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) oleh Letkol DJ. Somba. Pada pembentukan Permesta terdapat pula bantuan dan keikutsertaan dari masyarakat untuk mendukung adanya Permesta ini. Terdapat beberapa faktor secara khusus yang menjadi alasan masyarakat untuk mendukung adanya Permesta ini yaitu, karena terdapat hubungan rasa kekeluargaan serta rasa solidaritas antara anggota Permesta dengan masyarakat setempat yaitu masyarakat Kamuwa di Minahasa yang menjadikan Permesta masih tetap bertahan (Rondonuwu. R. R, 2016).

b. Adanya Campur Tangan dari Amerika

Pemberontakan PRRI tidak terlepas dari bantuan dan dukungan oleh CIA. Keterlibatan agen rahasia Amerika Serikat membuat hubungan diplomatis antara Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi sedikit renggang. Amerika Serikat terlibat pada kasus Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bukan karena tidak sengaja atau kebetulan saja, karena jika kita lihat hubungan politik luar negeri Amerika Serikat dengan Indonesia memang sudah terjalin sejak lama. Awal mula Amerika Serikat datang ke Indonesia itu berlabuh di Sumatera di Pantai Padang sekitar tahun 1770an, yaitu setelah Amerika Serikat merdeka dari pihak Inggris pada tahun 1776, disisi lain bersamaan pula dengan menurunnya hegemoni dari pihak VOC di Indonesia khususnya di Pantai Barat, Sumatera.

Amerika Serikat terlibat dalam Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) serta di Indonesia ini sudah berlangsung sejak masa perang dingin tahap kedua yaitu antara 1950an sampai 1960an. Aksi pendekatan dari CIA terhadap PRRI menjadi semakin terlihat setelah adanya kompromi-kompromi yang gagal antara penvira daerah (sebuah istilah untuk "Kolonel Pembangkang" dan Jakarta pada bulan April 1957.

c. Penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta

Setelah dicetuskannya Proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat serta Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi, membuat pemerintah pusat untuk melakukan suatu keputusan untuk menumpas Gerakan-gerakan separatis itu. Setelah itu pemerintah dengan cepat mempersiapkan sebuah operasi gabungan yang meliputi unsur darat, laut dan udara yang bertujuan untuk menumpas Gerakan separatis dari pihak PRRI dan Permesta. Operasi gabungan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat bernama Operasi 17 Agustus dibawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani untuk wilayah Sumatera Tengah, kemudian Letkol Kaharudin Nasution memimpin Operasi Tegas, lalu Brigjen Djatikusume memimpin Operasi Saptamarga, serta Letkol Dr. Ibnu Sutowo memimpin Operasi Sadar. Kemudian untuk penumpasan dari adanya pemberontakan Permesta di Sulawesi, Pemerintah pusat mengutus Lt kol Rukminto Hendraningrat untuk melaksanakan operasi militer yang disebut Operasi Merdeka (Sarlian, 2020).

d. Refleksi pasca Penumpasan PRRI/Permesta

Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat serta Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi terjadi karena adanya ketidakseimbangan pembangunan dan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau lainnya. Pembangunan dan ekonomi selalu terfokus di pulau Jawa, sehingga menyebabkan pembangunan yang beraada di daerah luar pulau Jawa menjadi terbengkalai. Kejadian tersebut yang menyebabkan rakyat Sumatera Barat dan Rakyat Sulawesi memunculkan ide untuk menyamaratakan Pembangunan dan Ekonomi di Indonesia secara menyeluruh.

Tujuan yang diusulkan oleh PRRI/Permesta sebenarnya sangat mulia yaitu untuk menyamaratakan pembangunan, hanya saja cara yang digunakan itu salah yaitu dengan membuat dewan daerah militer, seperti dewan manguni, dewan banteng,

dewan-gajah. Dewan-dewan tersebut dibentuk untuk menyuarakan aspirasi dari PRRI/Permesta dengan cara melawan kebijakan dari pemerintah. Akibat dari Tindakan tersebut Pemerintah Pusat menganggap bahwa itu merupakan suatu Tindakan pemberontakan sehingga harus ditumpas dengan operasi militer.

Pemberontakan PRRI/Permesta memberikan suatu refleksi untuk masyarakat Indonesia. Bahwa seharusnya pemerintah pusat harus bersikap adil dalam menyamaratakan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya nantinya tidak terjadi lagi pemberontakan seperti pemberontakan PRRI/Permesta. Saat ini presiden Indonesia sudah memperhatikan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari pembangunan yang terus menerus digencarkan diseluruh Indonesia dari sabang sampai Merauke.

3. Dampak dari PRRI/Permesta

a. Dampak PRRI/Permesta untuk Indonesia

Dampak dari pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat serta Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi tidak hanya terjadi pada saat di arena “perang saudara” akan tetapi juga setelah terjadi perang saudara tersebut. Akibat dari pemberontakan PRRI/Permesta memakan banyak korban. Pada laporan yang tercatat dalam Zed, M (2018) menyebutkan bahwa dalam dua tahun pertama prajurit dari pihak pemerintah memakan korban sebanyak 983 korban terbunuh, kemudian 1.695 korban luka-luka, serta 154 orang hilang akibat perang saudara tersebut. Kemudian disisi lain korban juga dialami oleh pihak PRRI/Permesta yaitu sebanyak 6.115 orang meninggal dunia, serta 627 orang hilang. Berdasarkan jumlah korban tersebut juga terdapat korban yang belum ditemukan dari Angkatan pemuda minang karena mereka terbunuh serta hilang sampai berakhirnya peperangan.

b. Dampak dari Pemberontakan PRRI/Permesta bagi Masyarakat Sumatera Barat

Pergolakan yang terjadi pada masa tersebut membuat rasa trauma bagi masyarakat setempat, salah satunya di daerah Sumatera Barat. Pemberontakan PRRI yang terjadi pada tahun 1958-1961 menyisakan rasa trauma pada masyarakat Sumatera Barat, karena bsnysk terjadi korban jiwa akibat pemberontakan tersebut, harta yang dimiliki oleh masyarakatpun lenyap, dan yang lebih parah dari dampak pemberontakan PRRI ini adalah dampak psikologis bagi masyarakat. PRRI dianggap sebagai sebuah Gerakan pemberontakan yang membawa nasib buruk bagi masyarakat Sumatera Barat (Ronidin, 2010).

Pemberontakan PRRI juga memberikan dampak bagi masyarakat Sumatera Barat. Terjadi pertumpahan darah akibat dari pemberontakan PRRI. Banyak korban yang tewas dari masyarakat Sumatera Barat akibat dari Pertumpahan darah PRRI. Selain itu muncul juga rasa trauma dari masyarakat Sumatera Barat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya pemberontakan PRRI yang awalnya memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menyamaratakan pembangunan dan ekonomi antara pulau jawa dan pulau lainnya tetapi berdampak buruk pada masyarakat sumatera barat sendiri, baik itu banyak kehilangan nyawa maupun yang memiliki rasa trauma mendalam akibat adanya pemberontakan PRRI tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pada tanggal 15 Februari 1958 diproklamkan berdirinya suatu pemerintahan diluar dari pemerintahan pusat yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI diproklamkan pada pukul 22.00 WIB dengan perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Disisi lain pada tanggal 17 Februari 1958, di Sulawesi terbentuklah suatu Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) oleh Letkol DJ. Somba. Hal tersebut terjadi

karena adanya ketidakseimbangan kebijakan pemerintah pusat antara wilayah di daerah Jawa dengan daerah luar pulau Jawa. Sikap itu muncul karena adanya keputusan pemerintah untuk mengerucutkan tubuh TNI yang menyebabkan beberapa personil TNI harus meninggalkan jabatannya atau dikenal dengan sebutan gantung senjata. Kemudian atas kejadian tersebut muncul rasa kecewa bagi para TNI yang selama ini mereka sudah berjuang mempertahankan Republik Indonesia dari para penjajah.

Pemberontakan PRRI/Permesta memberikan suatu refleksi untuk masyarakat Indonesia. Bahwa seharusnya pemerintah pusat harus bersikap adil dalam menyamaratakan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya nantinya tidak terjadi lagi pemberontakan seperti pemberontakan PRRI/Permesta. Saat ini presiden Indonesia sudah memperhatikan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari pembangunan yang terus menerus digencarkan diseluruh Indonesia dari sabang sampai Merauke.

UCAPAN TERIMA KASIH

Judul untuk ucapan terima kasih kepada lembaga pemerintah atau mitra penelitian atau orang yang sudah memberikan kontribusi selama penelitian.

REFERENSI

- Herbert, Riza, L. S, and Mukmin, A. (2011). Penerapan Jaringan Saraf Tiruan *Backpropagation* Untuk Peramalan Curah Hujan. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 1(1), 1-5. DOI:
- Apriansyah, D. T. and Wargadalem, F. R. (2020) 'Pemberontakan Prri Sumatra Selatan Tanpa Dewan Garuda', *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(2), p. 32. doi: 10.17977/um020v14i22020p32-44.
- Maulida, F. H. (2018) 'Hitam Putih Prri-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961', *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(2), p. 174. doi: 10.17510/paradigma.v8i2.180.
- May, E. (2015) 'Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Dan Gagalnya Penerapan Sistem Otonomi Daerah Di Sumatera Barat 1956-1961', pp. 1-53.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Nurbaity, N. (2022). PERISTIWA PRRI/PERMESTA DALAM PANDANGAN INGATAN ANTAGONISTIK DAN KOSMOPOLITAN DAN REPRESENTASI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT TIONGHOA ERA SOEHARTO. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- RONDONUWU, R. R. (2016). KAKAS DALAM PERISTIWA PERMESTA 1957-1961: "Ditinjau Dari Sudut Pandang Sejarah". *JURNAL ELEKTRONIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SAM RATULANGI*, 4(2).
- Ronidin, R. (2010). MASYARAKAT MINANGKABAU PASCA-PRRI: Dalam cerpen Ketika Jendral Pulang karya Khairul Jasmi. *Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa dan Pembelajaran Bahasa*, 3(2), 152-160.
- Sarilan, S. (2020) THE NEGATION OF PRRI IN HIGH SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS. *Journal of History Education and Religious Studies*, 1(1), 40-51.
- Singh, S. and Singh, N. (2016) 'Internet of Things (IoT): Security challenges, business opportunities & reference architecture for E-commerce', *Proceedings of the 2015 International Conference on Green Computing and Internet of Things, ICGCIoT 2015*, pp. 1577-1581. doi: 10.1109/ICGCIoT.2015.7380718.
- Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyudi, F. and Hardi, E. (2021) 'Pemilihan Nagari Batu Kambang Sebagai Tempat Tahanan PRRI', 3(1), pp. 298-308.
- Wiyatmi, W. W. (2013). Representasi sejarah Indonesia dalam novel-novel karya Ayu Utami. *LITERA*, 12(2).
- Zed, M (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Zed, M. (2009). Keterlibatan CIA dalam Kasus PRRI.